

## **BAB V PENUTUP**

### **5.1. Kesimpulan**

Pemaparan analisis diatas ialah Berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN Makassar yang dianalisi dengan Nvivo 12 Plus secara umum dari empat proses dapat dilihat Pemerintahan sebesar 52%, Swasta/corporate 44% Tetapi jika dipetakan dalam setiap proses indikator dapat dilihat *pertama* : pada proses perencanaan aktor yang terlibat Pemerintah 45%, Corporate sebesar 55%, *kedua* : pada proses Penawaran aktor yang terlibat Pemerintah 40%,Corporate 37%, *ketiga* : aktor yang terlibat Pemerintah 71%, Corporate 20 dan *keempat* : aktor yang terlibat Pemerintah 64,74% Corporate 35.26%.

Empat proses indikator diatas memiliki peran masing-masing dengan tingkat yang berbeda sehingga peran pemerintah dan corporate tetap saling bekerja sama dan berkolaborasi dalam mendistribusikan barang ATK ke 14 Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) TA. 2015 sesuai dengan berdasarkan Surat Pesanan (SP) No.800/016/DPK/I/2015 tanggal 05 Januari 2015 dan Surat Pesanan (SP) No.800/054/DPK/X/2015 tanggal 06 Oktober 2015 walaupun dalam corporate (perusahaan) Cv. Aksha Putra tidak menjalankan Tugas dengan Baik dengan tindak pidana korupsi Anggaran sebanyaknya Rp. 34.806.386,- (tiga puluh empat juta delapan ratus enam ribu tiga ratus delapan puluh enam rupiah) sebagai bagian dari total kerugian keuangan negara

sebesar Rp. 323.081.978,- (Tiga ratus dua puluh tiga juta delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana laporan hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara atas dugaan tindak pidana korupsi anggaran kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Makassar TA. 2015 dan TA. 2016 Nomor: SR-432/PW21/5/2018 tanggal 24 Juli 2018.

## **5.2 Rekomendasi**

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang menunjukkan kontribusi positif dan signifikansi dalam kasus putusan hakim mahkamah agung nomor 23/PID.SUS-TPK/2019/Pn Makassar sesuai dengan tahap-tahap penyelesaian :

1. Kepada pemerintahan indonesia khususnya Sulawesi Selatan dalam membuat proyek pembangunan daerah harus lebih integrasi perencanaan dan penganggaran , melakukan Audit pra, proses dan pasca PBJ (audit khusus kemanfaatan pengadaan barang dan jasa ) dan perluasan e-katalog, termasuk penguatan database harga dan spesifikasi barang dan jasa serta lembaga pengelola.
2. Bagi peneliti selanjutnya, demi menghasilkan penelitian yang lebih baik di masa mendatang, disarankan untuk lebih menambah data

dari media sosial seperti twitter,IG dan Berita tentang kasus yang ingin di teliti sehingga penelitiannya lebih baik.